



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II PANGKALPINANG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : W.7.PAS.PAS.4-447-OT.01.01 Tahun 2024

TENTANG

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PANGKALPINANG**

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PANGKALPINANG

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penetapan Rencana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Tahun 2024, maka perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang tentang Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1639);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PANGKALPINANG TENTANG RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PANGKALPINANG.**

Kesatu : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, merupakan sarana pengendalian capaian target sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dalam mencapai target Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang dengan Kantor Wilayah.

Kedua : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja bertujuan untuk:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

- Ketiga : Seluruh Kepala Divisi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan dari Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang.
- Keempat : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang bertanggung jawab atas seluruh laporan capaian rencana aksi;
 2. Pelaporan capaian rencana aksi dilakukan dengan mengisi matriks serta bukti pendukung melalui link yang akan disampaikan kemudian;
 3. Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang menyusun laporan tertulis hasil evaluasi mandiri (self assessment) terhadap pelaksanaan capaian rencana aksi;
 4. Waktu pelaporan capaian rencana aksi dilaksanakan setiap bulannya pada tanggal 5 bulan berikutnya;
 5. Evaluasi capaian Rencana Aksi Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang dilakukan setiap semester melalui rapat koordinasi capaian kinerja di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang.



Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 29 Februari 2024
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Nur Bambang Supri Handono
NIP 197303061998031001

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KINERJA | RUMUS PERHITUNGAN | KEGIATAN | PAGU | RENCANA PENARIKAN DANA | REALISASI ANGGARAN | RENCANA KEGIATAN | CAPAIAN | DATA DUKUNG | STATUS PELAKSANAAN | KETERANGAN | |
|------------------------------|--|---|---|---|--|------------------|------------------------|--------------------|--|--|-------------|---|--|--|
| DIVISI PEMASYARAKATAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah | Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak Sesuai dengan Standar | 85% | Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak Dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak Dikali 100% | Melakukan Pengawasan Terhadap Lapas agar Terpenuhinya Layanan Makanan pada Tahanan dan WBP | Rp 7.532.280.000 | Rp 1.883.070.000 | | TW I | Melakukan Monitoring ke Dapur Lapas Secara Berkala | TW I | | Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Pelayanan Makanan pada Tahanan/Anak Binaan /Warga Binaan di Lapas | |
| | | | | | | | Rp 1.883.070.000 | | TW II | Melakukan Monitoring ke Dapur Lapas Secara Berkala | TW II | | Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Pelayanan Makanan pada Tahanan/Anak Binaan /Warga Binaan di Lapas | |
| | | | | | | | Rp 1.883.070.000 | | TW III | Melakukan Monitoring ke Dapur Lapas Secara Berkala | TW III | | Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Pelayanan Makanan pada Tahanan/Anak Binaan /Warga Binaan di Lapas | |
| | | | | | | | Rp 1.883.070.000 | | TW IV | Melakukan Monitoring ke Dapur Lapas Secara Berkala | TW IV | | Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Pelayanan Makanan pada Tahanan/Anak Binaan /Warga Binaan di Lapas | |
| | Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas | 95% | Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara Berkualitas Dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak Dikali 100% | Melakukan pengawasan terhadap Lapas agar terpenuhinya layanan kesehatan yang merata pada Tahanan dan WBP | Rp 121.800.000 | Rp 30.450.000 | | TW I | Melakukan Pengecekan ke Klinik Pratama dalam Hal Pemenuhan Obat-Obat serta Alat Kesehatan untuk Kebutuhan Layanan Kesehatan pada Tahanan dan WBP | TW I | | Laporan Monev Penyelenggaraan Layanan Kesehatan / Klinik Pratama terhadap Tahanan/Anak Binaan/Warga Binaan di Lapas | | |
| | | | | | | Rp 30.450.000 | | TW II | Melakukan Pengecekan ke Klinik Pratama dalam Hal Pemenuhan Obat-Obat serta Alat Kesehatan untuk Kebutuhan Layanan Kesehatan pada Tahanan dan WBP | TW II | | Laporan Monev Penyelenggaraan Layanan Kesehatan / Klinik Pratama terhadap Tahanan/Anak Binaan/Warga Binaan di Lapas | | |
| | | | | | | Rp 30.450.000 | | TW III | Melakukan Pengecekan ke Klinik Pratama dalam Hal Pemenuhan Obat-Obat serta Alat Kesehatan untuk Kebutuhan Layanan Kesehatan pada Tahanan dan WBP | TW III | | Laporan Monev Penyelenggaraan Layanan Kesehatan / Klinik Pratama terhadap Tahanan/Anak Binaan/Warga Binaan di Lapas | | |
| | | | | | | Rp 30.450.000 | | TW IV | Melakukan Pengecekan ke Klinik Pratama dalam Hal Pemenuhan Obat-Obat serta Alat Kesehatan untuk Kebutuhan Layanan Kesehatan pada Tahanan dan WBP | TW IV | | Laporan Monev Penyelenggaraan Layanan Kesehatan / Klinik Pratama terhadap Tahanan/Anak Binaan/Warga Binaan di Lapas | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|--|---------------|--------------|--------|--|--|------|---|---|--|--|
| Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar | 90% | Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang Membutuhkan Layanan Kesehatan Dikali 100% | Melakukan Pengawasan terhadap Lapas / Rutan / Lpka terhadap Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Rp 19.928.500 | Rp 4.982.125 | | TW I | Melakukan Pengawasan Pelayanan Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang Membutuhkan Layanan Kesehatan | TW I | | Laporan Pengawasan Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas / Rutan / LPKA | | |
| | | | | Rp 4.982.125 | | TW II | Melakukan Pengawasan Pelayanan Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang Membutuhkan Layanan Kesehatan | TW II | | Laporan Pengawasan Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas / Rutan / LPKA | | | |
| | | | | Rp 4.982.125 | | TW III | Melakukan Pengawasan Pelayanan Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang Membutuhkan Layanan Kesehatan | TW III | | Laporan Pengawasan Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas / Rutan / LPKA | | | |
| | | | | Rp 4.982.125 | | TW IV | Melakukan Pengawasan Pelayanan Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang Membutuhkan Layanan Kesehatan | TW IV | | Laporan Pengawasan Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas / Rutan / LPKA | | | |
| Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar | 90% | Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Membutuhkan Layanan Kesehatan Dikali 100% | Melakukan Pengawasan pada Lapas terhadap Tahanan/ Narapidana/ Anak yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar | Rp 18.248.500 | Rp 4.562.125 | | TW I | Melakukan Pengawasan Tahanan/Narapidana/Anak yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) | TW I | | Laporan Pengawasan Tahanan/Anak Binaan/Warga Binaan yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas | | |
| | | | | Rp 4.562.125 | | TW II | Melakukan Pengawasan Tahanan/Narapidana/Anak yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) | TW II | | Laporan Pengawasan Tahanan/Anak Binaan/Warga Binaan yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas | | | |
| | | | | Rp 4.562.125 | | TW III | Melakukan Pengawasan Tahanan/Narapidana/Anak yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) | TW III | | Laporan Pengawasan Tahanan/Anak Binaan/Warga Binaan yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|----------------|----------------|--------|--|--|-------|--|--|--|--|
| | | | | | Rp 4.562.125 | | TW IV | Melakukan Pengawasan Tahanan/Narapidana/Anak yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan dengan Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) | TW IV | | Laporan Pengawasan Tahanan/Anak Binaan/Warga Binaan yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Lapas | | |
| Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh) | 90% | Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular = $\frac{[A + B]}{2} \times 100\%$ | Melakukan Pengawasan pada Lapas yang Melakukan Penangan Penyakit Menular | | | TW I | Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas yang Memiliki Tahanan/Narapida/Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular | TW I | | Laporang Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas yang Memiliki Tahanan/Narapidana/Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular | | | |
| | | | | | | TW II | Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas yang Memiliki Tahanan/Narapida/Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular | TW II | | Laporang Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas yang Memiliki Tahanan/Narapidana/Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular | | | |
| | | | | | | TW III | Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas yang Memiliki Tahanan/Narapida/Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular | TW III | | Laporang Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas yang Memiliki Tahanan/Narapidana/Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular | | | |
| | | | | | | TW IV | Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas yang Memiliki Tahanan/Narapida/Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular | TW IV | | Laporang Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Penyakit Menular pada Lapas yang Memiliki Tahanan/Narapidana/Anak Binaan yang Memiliki Penyakit Menular | | | |
| Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika | 29% | Jumlah Perubahan Kualitas Hidup Narapidana Pecandu/Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika Dibagi Jumlah Narapidana Pecandu/Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Dikali 100% | Melakukan Pengawasan pada Kegiatan Rehabilitasi yang Dilaksanakan oleh Lapas Narkotika kepada Tahanan/Narapidana Pecandu/Penyalahguna/ Korban Narkotika yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi | Rp 395.880.000 | Rp 131.960.000 | TW I | Melakukan Pengawasan terhadap Asesmen/Screening Intake pada Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika | TW I | | Laporan Pengawasan Pelaksanaan Asesmen/Screening Intake pada Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika | | | |
| | | | | | Rp 197.940.000 | TW II | Melakukan Pengawasan terhadap Asesmen/Screening Intake pada Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika | TW II | | Laporan Pengawasan Pelaksanaan Asesmen/Screening Intake pada Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika | | | |
| | | | | | Rp 65.980.000 | TW III | Melakukan Pengawasan terhadap Asesmen/Screening Intake pada Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika | TW III | | Laporan Pengawasan Pelaksanaan Asesmen/Screening Intake pada Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika | | | |
| | | | | | - | TW IV | Melakukan Pengawasan terhadap Asesmen/Screening Intake pada Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika | TW IV | | Laporan Pengawasan Pelaksanaan Asesmen/Screening Intake pada Narapidana Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----|---|--|----|-------------|----|------------|--------|--|--------|--|---------------------------------|--|--|
| 18 | Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi | Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian | 75% | Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian Dibagi Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 100% | Melakukan Monev pada Bidang Pembinaan/Pelayanan Tahanan/Registrasi | Rp | 149.544.000 | Rp | 37.386.000 | TW I | Melakukan Monev pada Bidang Pembinaan/Pelayanan Tahanan/Registrasi di Lapas untuk Melakukan Penghitungan Jumlah Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian dengan Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan | TW I | | Laporan Monitoring dan Evaluasi | | |
| | | | | | | Rp | | | 37.386.000 | TW II | Melakukan Monev pada Bidang Pembinaan/Pelayanan Tahanan/Registrasi di Lapas untuk Melakukan Penghitungan Jumlah Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian dengan Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan | TW II | | Laporan Monitoring dan Evaluasi | | |
| | | | | | | Rp | | | 37.386.000 | TW III | Melakukan Monev pada Bidang Pembinaan/Pelayanan Tahanan/Registrasi di Lapas untuk Melakukan Penghitungan Jumlah Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian dengan Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan | TW III | | Laporan Monitoring dan Evaluasi | | |
| | | | | | | Rp | | | 37.386.000 | TW IV | Melakukan Monev pada Bidang Pembinaan/Pelayanan Tahanan/Registrasi di Lapas untuk Melakukan Penghitungan Jumlah Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian dengan Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan | TW IV | | Laporan Monitoring dan Evaluasi | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|--------------|--------------|--------|---|---|------|--|--|--|--|
| Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi | 100% | Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi Dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Hak Remisi Dikali 100% | Melakukan Monev pada Buku Remisi Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif | Rp 7.200.000 | Rp 1.800.000 | | TW I | Melakukan Penghitungan terhadap Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Hak Remisi | TW I | | Laporan Monev Pemeriksaan Buku Remisi Narapidana | | |
| | | | | Rp 1.800.000 | | TW II | Melakukan Penghitungan terhadap Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Hak Remisi | TW II | | Laporan Monev Pemeriksaan Buku Remisi Narapidana | | | |
| | | | | Rp 1.800.000 | | TW III | Melakukan Penghitungan terhadap Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Hak Remisi | TW III | | Laporan Monev Pemeriksaan Buku Remisi Narapidana | | | |
| | | | | Rp 1.800.000 | | TW IV | Melakukan Penghitungan terhadap Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Hak Remisi | TW IV | | Laporan Monev Pemeriksaan Buku Remisi Narapidana | | | |
| Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi | 90% | Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial Dikali 100% | Melakukan Pemeriksaan dan Pengecekan pada Buku Integrasi Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Program Reintegrasi Sosial pada Lapas | Rp 7.200.000 | Rp 1.800.000 | | TW I | Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial | TW I | | Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Integrasi Narapidana | | |
| | | | | Rp 1.800.000 | | TW II | Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial | TW II | | Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Integrasi Narapidana | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|---|---------------|---------------|--|--------|---|--------|--|---|--|--|
| | | | | | Rp 1.800.000 | | TW III | Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial | TW III | | Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Integrasi Narapidana | | |
| | | | | | Rp 1.800.000 | | TW IV | Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dengan Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk Diusulkan Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial | TW IV | | Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Integrasi Narapidana | | |
| Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat | 34% | Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat Dibagi Jumlah Narapidana Dikali 100% | Melakukan Pemeriksaan dan Pengecekan pada Buku Bimbingan Kerja (Bimker), serta Sarana dan Prasarana | Rp 76.600.000 | - | | TW I | Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat dengan Jumlah Narapidana | TW I | | Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Bimbingan Kerja (Bimker) serta Sarana dan Prasarana | | |
| | | | | | Rp 76.600.000 | | TW II | Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat dengan Jumlah Narapidana | TW II | | Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Bimbingan Kerja (Bimker) serta Sarana dan Prasarana | | |
| | | | | | - | | TW III | Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat dengan Jumlah Narapidana | TW III | | Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Bimbingan Kerja (Bimker) serta Sarana dan Prasarana | | |
| | | | | | - | | TW IV | Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat dengan Jumlah Narapidana | TW IV | | Laporan Monev Pemeriksaan dan Pengecekan Buku Bimbingan Kerja (Bimker) serta Sarana dan Prasarana | | |
| Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif | 77% | Jumlah Narapidana yang Bekerja dan Produktif Dibagi Jumlah Narapidana yang Menjalankan Program Asimilasi Dikali 100% | Melakukan Monev pada Lapas dalam Pelaksanaan Program Asimilasi | - | - | | TW I | Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Bekerja dan Produktif dengan Jumlah Narapidana yang Menjalankan Program Asimilasi | TW I | | Laporan Monev Pelaksanaan Program Asimilasi | | |
| | | | | | - | | TW II | Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Bekerja dan Produktif dengan Jumlah Narapidana yang Menjalankan Program Asimilasi | TW II | | Laporan Monev Pelaksanaan Program Asimilasi | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----|--|--|----|-----------|----|-----------|--|--|--------|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | TW III | Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Bekerja dan Produktif dengan Jumlah Narapidana yang Menjalankan Program Asimilasi | TW III | | Laporan Monev Pelaksanaan Program Asimilasi | | | |
| | | | | | | | | | TW IV | Melakukan Monitoring dalam Penghitungan Jumlah Narapidana yang Bekerja dan Produktif dengan Jumlah Narapidana yang Menjalankan Program Asimilasi | TW IV | | Laporan Monev Pelaksanaan Program Asimilasi | | | |
| 20 | Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar | Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar | 90% | Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan Dibagi Jumlah Pengaduan yang Masuk Dikali 100% | Melakukan Klarifikasi terhadap Laporan Masyarakat yang Masuk pada Lapas | Rp | 950.000 | Rp | 237.500 | TW I | Melakukan Pengawasan terhadap Tindak Lanjut atas Laporan Pengaduan yang Masuk ke Dalam Lapas | TW I | | Laporan Pengawasan atas Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat | | |
| | | | | | | | | Rp | 237.500 | TW II | Melakukan Pengawasan terhadap Tindak Lanjut atas Laporan Pengaduan yang Masuk ke Dalam Lapas | TW II | | Laporan Pengawasan atas Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat | | |
| | | | | | | | | Rp | 237.500 | TW III | Melakukan Pengawasan terhadap Tindak Lanjut atas Laporan Pengaduan yang Masuk ke Dalam Lapas | TW III | | Laporan Pengawasan atas Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat | | |
| | | | | | | | | Rp | 237.500 | TW IV | Melakukan Pengawasan terhadap Tindak Lanjut atas Laporan Pengaduan yang Masuk ke Dalam Lapas | TW IV | | Laporan Pengawasan atas Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat | | |
| | | Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah | 90% | Jumlah Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah Dibagi Jumlah Seluruh Gangguan Kamtib yang Terjadi Dikali 100% | Melakukan Bimbingan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (BIMTORWASDAL) terhadap Gangguan Kamtib pada Lapas Secara Berkala | Rp | 7.473.333 | Rp | 1.868.333 | TW I | Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan dan Ketertiban pada Lapas Secara Berkala | TW I | | Laporan Pengawasan Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan dan Ketertiban | | |
| | | | | | | | | Rp | 1.868.333 | TW II | Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan dan Ketertiban pada Lapas Secara Berkala | TW II | | Laporan Pengawasan Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan dan Ketertiban | | |
| | | | | | | | | Rp | 1.868.333 | TW III | Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan dan Ketertiban pada Lapas Secara Berkala | TW III | | Laporan Pengawasan Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan dan Ketertiban | | |
| | | | | | | | | Rp | 1.868.333 | TW IV | Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan dan Ketertiban pada Lapas Secara Berkala | TW IV | | Laporan Pengawasan Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan dan Ketertiban | | |
| | | Persentase Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan | 90% | Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib yang Mengulangi | Melakukan Sidang BAP terhadap Pelaku Gangguan Kamtib pada Lapas | Rp | 7.473.333 | Rp | 1.868.333 | TW I | Melakukan Bimbingan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (BIMTORWASDAL) di Lapas | TW I | | Laporan BIMTORWASDAL | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------|---|---|----------------|--------------|--------|---|--------|--|--|--|--|
| | | Kamtib | | Pelanggarannya Dibagi Jumlah Pelaku Gangguan Kamtib Dikali 100% | | Rp 1.868.333 | | TW II | Melakukan Bimbingan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (BINTORWASDAL) di Lapas | TW II | | Laporan BINTORWASDAL | | |
| | | | | | | Rp 1.868.333 | | TW III | Melakukan Bimbingan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (BINTORWASDAL) di Lapas | TW III | | Laporan BINTORWASDAL | | |
| | | | | | | Rp 1.868.333 | | TW IV | Melakukan Bimbingan, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian (BINTORWASDAL) di Lapas | TW IV | | Laporan BINTORWASDAL | | |
| | | Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas | 90% | Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100% | Melakukan Penambahan Bantuan Regu Jaga Pasca terjadinya Gangguan Kamtib | Rp 7.473.333 | Rp 1.868.333 | TW I | Meningkatkan Frekuensi Pengeledahan Rutin dan Insidentil pada Lapas | TW I | | Laporan Pengeledahan pada Lapas | | |
| | | | | | | Rp 1.868.333 | | TW II | Meningkatkan Frekuensi Pengeledahan Rutin dan Insidentil pada Lapas | TW II | | Laporan Pengeledahan pada Lapas | | |
| | | | | | | Rp 1.868.333 | | TW III | Meningkatkan Frekuensi Pengeledahan Rutin dan Insidentil pada Lapas | TW III | | Laporan Pengeledahan pada Lapas | | |
| | | | | | | Rp 1.868.333 | | TW IV | Meningkatkan Frekuensi Pengeledahan Rutin dan Insidentil pada Lapas | TW IV | | Laporan Pengeledahan pada Lapas | | |
| 21 | Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker | Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu | 1 Dokumen | Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel | Melakukan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel | Rp 2.200.000 | Rp 550.000 | TW I | Meningkatkan Kualitas Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel | TW I | | Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel | | |
| | | | | | | Rp 550.000 | | TW II | Meningkatkan Kualitas Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel | TW II | | Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel | | |
| | | | | | | Rp 550.000 | | TW III | Meningkatkan Kualitas Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel | TW III | | Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel | | |
| | | | | | | Rp 550.000 | | TW IV | Meningkatkan Kualitas Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel | TW IV | | Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel | | |
| | | Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan KerumahTangga | 1 Dokumen | Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tangga | Melakukan penyusunan Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tangga | Rp 5.460.000 | Rp 1.365.000 | TW I | Meningkatkan Kualitas penyusunan Dokumen Pengelolaan BMN dan KerumahTangga | TW I | | Dokumen Pengelolaan BMN dan KerumahTangga | | |
| | | | | | | Rp 1.365.000 | | TW II | Meningkatkan Kualitas penyusunan Dokumen Pengelolaan BMN dan KerumahTangga | TW II | | Dokumen Pengelolaan BMN dan KerumahTangga | | |
| | | | | | | Rp 1.365.000 | | TW III | Meningkatkan Kualitas penyusunan Dokumen Pengelolaan BMN dan KerumahTangga | TW III | | Dokumen Pengelolaan BMN dan KerumahTangga | | |
| | | | | | | Rp 1.365.000 | | TW IV | Meningkatkan Kualitas penyusunan Dokumen Pengelolaan BMN dan KerumahTangga | TW IV | | Dokumen Pengelolaan BMN dan KerumahTangga | | |
| | | Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan | 1 Dokumen | Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan | Melakukan monitoring Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan | Rp 107.070.000 | - | TW I | - | TW I | | - | | |
| | | | | | | Rp 53.535.000 | | TW II | Meningkatkan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan | TW II | | Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai | | |
| | | | | | | Rp 53.535.000 | | TW III | Meningkatkan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan | TW III | | Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai | | |
| | | | | | | - | | TW IV | - | TW IV | | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|---|------------------|----------------|--|--------|---|--------|--|--|--|--|
| | Terpenuhiya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu | 1 Dokumen | Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu | Melakukan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu | Rp 1.700.000 | Rp 425.000 | | TW I | Meningkatkan Kualitas penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu | TW I | | Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu | | |
| | | | | | | Rp 425.000 | | TW II | Meningkatkan Kualitas penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu | TW II | | Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu | | |
| | | | | | | Rp 425.000 | | TW III | Meningkatkan Kualitas penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu | TW III | | Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu | | |
| | | | | | | Rp 425.000 | | TW IV | Meningkatkan Kualitas penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu | TW IV | | Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu | | |
| | Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Dokumen | Jumlah Layanan Perkantoran | Jumlah Layanan Perkantoran | Rp 1.499.046.000 | Rp 374.761.500 | | TW I | Layanan Perkantoran | TW I | | Layanan Perkantoran | | |
| | | | | | | Rp 374.761.500 | | TW II | Layanan Perkantoran | TW II | | Layanan Perkantoran | | |
| | | | | | | Rp 374.761.500 | | TW III | Layanan Perkantoran | TW III | | Layanan Perkantoran | | |
| | | | | | | Rp 374.761.500 | | TW IV | Layanan Perkantoran | TW IV | | Layanan Perkantoran | | |



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Nur Bambang Supri Handono
NIP 197303061998031001